

Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Penerimaan Daerah Di Kota Jayapura

Jemy Ricardo Parera* dan Ayub Tanudy*

* Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

ARTICLE INFO

Riwayat Artikel:

Diterima 10 Desember 2022

Disetujui 31 Januari 2023

Keywords:

Pendapatan Asli Daerah
Penerimaan Daerah
Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah

ABSTRAK

Abstract : Regional financial management, namely in the form of management of the regional revenue and expenditure budget (APBD). According to Law No. 32 of 2003 concerning the meaning of the APBD is the regional government's annual financial plan which is discussed and agreed upon jointly by the local government and DPRD and stipulated in a regional regulation (Perda). Regional financial management begins with the planning/composition of the regional revenue expenditure budget (APBD), which is then prepared according to the needs of government administration and the ability of regional revenues. To increase accountability and flexibility in spending the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), potential regional revenue sources must be explored optimally within the corridors of the applicable laws and regulations. One of the elements of the APBD is Regional Original Revenue (PAD). The higher the financial authority owned by the region, the higher the role of Regional Original Revenue (PAD) in the regional financial structure, and vice versa Regional Original Revenue (PAD) is all revenues obtained by regions from sources within their own territory which are collected based on regional regulations in accordance with the applicable laws and regulations. The Regional Budget or Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) is the main policy instrument for local governments. The value of R is 0.575, which means that 58 percent of the influence of the regional revenue variable can be explained by the PAD variable, while the remaining 42 percent is explained by other variables outside this study. The coefficient of determination (R²) is 0.33 which means that 33 percent of the influence of regional revenue variables can be explained by the PAD variable for the remaining 67 percent is explained by other variables outside this study. The value of Adjusted R Square is 0.108, which means that 11 percent. The influence of the local revenue variable can be explained by the PAD variable. The remaining 89 percent is explained by other variables outside of this study. The constant value (a value) is 1.63, meaning that if the X variable (PAD) has not changed, the value of Y (Regional Tax) is 1.63

Abstrak : Pengelolaan keuangan daerah yaitu berupa pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Menurut UU No.32 Tahun 2003 tentang pengertian APBD adalah sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dalam peraturan Daerah (Perda). Pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan/penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), yang kemudian disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal didalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu unsur APBD adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kewenangan keuangan yang dimiliki daerah, maka semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur keuangan daerah, begitu pula sebaliknya Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku . Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Besarnya nilai R 0.575 yang berarti bahwa 58 persen Pengaruh variabel penerimaan daerah dapat dijelaskan oleh variabel PAD

untuk sisanya 42 persen dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar penelitian ini. Koefisien Determinasi (R^2) adalah 0.33 yang berarti bahwa 33 persen Pengaruh variabel penerimaan daerah dapat dijelaskan oleh variabel PAD untuk sisanya 67 persen dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar penelitian ini. Besarnya nilai Adjusted R Square adalah 0.108 yang berarti bahwa 11 persen Pengaruh variabel penerimaan daerah dapat dijelaskan oleh variabel PAD untuk sisanya 89 persen dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar penelitian ini. Besarnya nilai Konstanta (nilai a) sebesar 1.63, artinya apabila variabel X (PAD) tidak mengalami perubahan maka nilai Y (Pajak Daerah) adalah sebesar 1.63

Open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Alamat Korespondensi :

Jemy Ricardo Parera
Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan,
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura,
Jl. Beringin Entrop, Kota Jayapura, Papua
E-Mail : ricardojimmy77@gmail.com

Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian internal dari pembangunan nasional yang dilaksanakan untuk memberikan kesempatan dan ruang gerak bagi upaya pengembangan demokratisasi dan kinerja pemda untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Kebijakan otonomi daerah memberi peluang bagi perubahan paradigma pembangunan yang semula lebih mengedepankan pencapaian pertumbuhan menjadi pemerataan dengan prinsip mengutamakan keadilan dan perimbangan. Daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawabnya untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat luas.

Data penerimaan daerah kota jayapura tahun 2020 penerimaan daerah target sebesar Rp. 1.227.258.801.881 dengan tingkat realisasi sebesar Rp. 1.284.896.316.547, tahun 2021 mengalami penurunan menjadi penerimaan daerah target sebesar Rp. 215.050.843.525 dengan tingkat realisasi sebesar Rp. 967.460.322.477, ini disebabkan dampak dari penyebaran Covid 19 di Kota Jayapura bagi perkembangan pertumbuhan daerah di kota Jayapura. Tahun 2021 penerimaan daerah kota jayapura mulai membaik dengan angka yang cukup baik yaitu sebesar 96.60 persen walaupun dampak covid-19 masih cukup tinggi saat itu, tetapi usaha pemerintah kota jayapura untuk menjaga kestabilan pertumbuhan mulai terwujud dengan baik.

Dari data tahun 2020 total penerimaan PAD target sebesar Rp. 130.018.313.571 dengan tingkat realisasi sebesar Rp. 150.832.228.818, dan tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi penerimaan PAD target sebesar Rp. 215.050.843.525 dengan tingkat realisasi sebesar Rp. 220.742.371.996, ini disebabkan dampak dari penyebaran Covid 19 di Kota Jayapura bagi perkembangan penerimaan PAD di kota Jayapura. Tahun 2021 penerimaan daerah kota jayapura mulai membaik dengan angka yang cukup baik yaitu sebesar 96.60 persen walaupun dampak covid-19 masih cukup tinggi saat itu, tetapi usaha pemerintah kota jayapura untuk menjaga kestabilan pertumbuhan mulai terwujud dengan baik.

Bertolak dari latar belakang diatas penulis, melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap penerimaan daerah di Kota Jayapura.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikandiatas maka permasalahan yang perlu dikemukakan dalam penelitian adalah:

1. Berapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap penerimaan daerah di Kota Jayapura ?
2. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penerimaan daerah di Kota Jayapura ?

Kajian Teori

Teori Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Nurcholish (2007), PAD adalah suatu jenis pendapatan yang didapatkan dari penerimaan pajak, retribusi, laba yang sah secara sah milik suatu daerah. Pendapatan daerah dalam arti ini misalnya saja adalah pendapatan daerah dari Pajak Motor, Mobil, Rumah Makan, dan lain sebagainya

Dr. Muhammad Fauzan (2006) PAD (Pendapatan Asli Daerah) ialah suatu jenis sumber pembiayaan pemerintah daerah, yang selalu bertujuan untuk membangun daerah asal atau dapat dikatakan kembali lagi dana yang diberikan untuk daerah yang bersangkutan.

Sumber Pendapatan Asli Daerah ada berbagai macam, berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terdiri dari :

1. Pajak Daerah, pajak daerah merupakan pungutan daerah menurut peraturan daerah yang dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah sebagai badan hukum.
2. Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, bagian badan usaha milik daerah ialah bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atas badan lain yang merupakan dan usaha milik daerah. Sedangkan perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal milik perusahaan Negara/BUMN, dan bagian laba atas
4. penyertaan modal milik perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
5. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, merupakan penerimaan selain yang disebutkan diatas tapi sah. Penerimaan ini mencakup sewa rumah dinas daerah, sewa gedung dan tanah milik perusahaan milik daerah dan penerimaan – penerimaan lain yang sah menurut Undang – Undang. Hasil penjualan kekayaan-kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran atau cicilan, seperti jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah, penerimaan komisi, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari badan layanan umum daerah (BLUD).

Teori Penerimaan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, yang dimaksud dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi dijelaskan hal-hal sebagai berikut: 19 a. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan yang bersumber dari :

Fungsi budgeter yaitu bila pajak sebagai alat untuk mengisi kas negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Sementara, fungsi regulator yaitu bila pajak dipergunakan sebagai alat mengatur untuk mencapai tujuan.

Menurut Teresa Ter-Minassian 1997, beberapa kriteria dan pertimbangan yang diperlukan dalam pemberian kewenangan perpajakan kepada tingkat Pemerintahan Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu .

1. Pajak yang dimaksudkan untuk tujuan stabilisasi ekonomi dan cocok untuk tujuan distribusi pendapatan seharusnya tetap menjadi tanggungjawab pemerintah pusat.
2. Basis pajak yang diserahkan kepada daerah seharusnya tidak terlalu “mobile”.
3. Basis pajak yang distribusinya sangat timpang antar daerah, seharusnya diserahkan kepada pemerintah pusat.
4. Pajak daerah seharusnya jelas bagi pembayar pajak daerah, objek dan subjek pajak dan besarnya pajak terutang dapat dengan mudah dihitung sehingga dapat mendorong akuntabilitas daerah visible.
5. Pajak daerah seharusnya tidak dapat dibebankan kepada penduduk daerah lain, karena akan memperlemah hubungan antar pembayar pajak dengan pelayanan yang diterima.
6. Pajak daerah seharusnya dapat menjadi sumber penerimaan yang memadai untuk menghindari ketimpangan fiskal vertikal yang besar.
7. Hasil penerimaan, idealnya, harus elastis sepanjang waktu dan seharusnya tidak terlalu berfluktuasi.
8. Pajak yang diserahkan kepada daerah seharusnya relatif mudah diadministrasikan atau dengan kata lain perlu pertimbangan efisiensi secara ekonomi berkaitan dengan kebutuhan data.

9. Pajak dan retribusi berdasarkan prinsip manfaat dapat digunakan secukupnya pada semua tingkat pemerintahan, namun penyerahan kewenangan pemungutannya kepada daerah akan tepat sepanjang manfaatnya dapat dilokalisir bagi pembayar pajak lokal.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan kuantitatif. Penelitian kuantitatif dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menggali data deskriptif dari orang-orang yang diamati atau perilaku yang diamati. Di samping itu dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif hal ini bertujuan untuk menerapkan prinsip-prinsip objektivitas melalui penggunaan variabel-variabel yang berhubungan dengan penelitian..

Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kota Jayapura, tempatnya pada Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kota Jayapura, Jln. Sam ratulangi APO Jayapura Utara.

Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan dengan waktu kurang lebih 6 bulan, dari bulan April – Agustus 2022

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah

- Studi lapangan (*field reseach*) studi pustaka adalah satu teknik pengumpulan data yang digunakan melalui tanya jawab atau wawancara dengan pihak-pihak terkait bagian Dinas BPS Kota Jayapura dan Dinas Sosial Kota Jayapura untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan.
- Studi kepustakaan (*library reseach*) studi kepustakaan adalah salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan melalui literatur-literatur atau buku-buku yang relevan dengan penulisan ini.

Teknik Analisis Data

Untuk mencapai tujuan penelitian sebagaimana ditetapkan sebelumnya, maka penelitian ini menggunakan metode analisis regresi sederhana. Metode Analisis Regresi Sederhana. Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Y = a + bx$$

Dimana:

Y : Penerimaan Daerah

a : Intecept / Konstanta

b : Koefisien Regresi

X : PAD

(Agustina, Ovi. 2009, Ekonometrika Terapan)

Definisi Operasioanl

Adapun defenisi opsional dari penelitian ini adalah:

- Penerimaan daerah adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu Negara cesara berkesinambungan menuju keadaan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi data diartikan jga sebagai proses kenaikan kepastian produk suatu satu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.
- Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daetah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi

Hasil Penelitian

Perkembangan Penerimaan Daerah Kota Jayapura

Penerimaan Daerah yang terjadi di Kota Jayapura selalu dibarengi dengan regulasi yang dibuat oleh pemerintah Kota Jayapura secara umum dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1 Perkembangan Penerimaan Daerah Kota Jayapura Tahun 2017-2021

TAHUN	TARGET	REALISASI	(%)
2017	1.273.232.545.691	1.068.022.271.558	-
2018	1.324.185.109.958	1.189.766.260.468	1.19
2019	1.200.500.0000.000	1.210.002.868,214	1.21
2020	1.227.258.801.881	1.284.896.316.547	7.49
2021	215.050.843.525	967.460.322.477	9.67

Sumber : Bappenda Kota Jayapura, 2022

Dari data diatas dapat dilihat bahwa perkembangan tingkat penerimaan daerah di Kota Jayapura selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi ditahun pada tahun 2017 penerimaan daerah target sebesar Rp. 1.273.232.545.691 dengan tingkat realisasi sebesar Rp. 1.068.022.271.558, tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi penerimaan daerah target sebesar Rp. 1.324.185.109.958 dengan tingkat realisasi sebesar Rp. 1.189.766.260.468, tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi penerimaan daerah target sebesar Rp. 1.200.500.0000.000 dengan tingkat realisasi sebesar Rp. 1.210.002.868,214, tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi penerimaan daerah target sebesar Rp. 1.227.258.801.881 dengan tingkat realisasi sebesar Rp. 1.284.896.316.547, tahun 2021 mengalami penurunan menjadi penerimaan daerah target sebesar Rp. 215.050.843.525 dengan tingkat realisasi sebesar Rp. 967.460.322.477, ini disebabkan dampak dari penyebaran Covid 19 di Kota Jayapura bagi perkembangan pertu penerimaan daerah di kota Jayapura. Tahun 2021 penerimaan daerah kota jayapura mulai membaik dengan angka yang cukup baik yaitu sebesar 96.60 persen walaupun dampak covi-19 masih cukup tinggi saat itu, tetapi usaha pemerintah kota jayapura untuk menjaga kestabilan pertumbuhan mulai terwujud dengan baik.

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura

Perkembangan PAD yang terjadi di Kota Jayapura selalu dibarengi dengan regulasi yang dibuat oleh pemerintah Kota Jayapura secara umum dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2 Perkembangan PAD Kota Jayapura Tahun 2017-2021

TAHUN	TARGET	REALISASI	(%)
2017	170.247.695.314	173.932.748.009	-
2018	187.759.986,678	195.740.640.996	12.551
2019	200.500.000.000	210.002.868.714	7.29
2020	130.018.313.571	150.832.228.818	-28.18
2021	215.050.843.525	220.742.371.996	4.35

Sumber : Bappenda Kota Jayapura, 2022

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Perkembangan PAD di Kota Jayapura selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi ditahun pada tahun 2017 penerimaan PAD target sebesar Rp. 170.247.695.314 dengan tingkat realisasi sebesar Rp. 173.932.748.009, tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi penerimaan PAD target sebesar Rp. 187.759.986,678 dengan tingkat realisasi sebesar Rp. 195.740.640.996, tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi penerimaan PAD target sebesar Rp. 200.500.000.000 dengan tingkat realisasi sebesar Rp. 210.002.868.714, tahun 2020 mengalami penurunan menjadi penerimaan PAD target sebesar Rp. 130.018.313.571 dengan tingkat realisasi sebesar Rp. 150.832.228.818, hal disebabkan oleh dampak covid-19, yang terjadi di seluruh dunia dan juga terjadi di kota jayapura sampai saat ini, dan tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi penerimaan PAD target sebesar Rp. 215.050.843.525 dengan tingkat realisasi sebesar Rp. 220.742.371.996, ini disebabkan dampak dari penyebaran Covid 19 di Kota Jayapura bagi perkembangan penerimaan PAD di kota Jayapura. Tahun 2021 penerimaan daerah kota jayapura mulai membaik dengan angka yang cukup baik yaitu sebesar 96.60 persen walaupun dampak covi-19 masih cukup tinggi saat itu, tetapi usaha pemerintah kota jayapura untuk menjaga kestabilan pertumbuhan mulai terwujud dengan baik.

Analisis Data

Berikut dibawah ini merupakan data Hasil Regresi Pengaruh PAD Terhadap Penerimaan Daerah di Kota Jayapura Tahun 2017-2021 sebagai berikut :

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model regresi linear sederhana dimana dalam analisis regresi ini dilakukan yaitu Regresi Pengaruh PAD Terhadap Penerimaan Daerah di Kota Jayapura Tahun 2017-2021 Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian sabagai berikut:

Tabel 3 Hasil Analisis Regresi

Variabel	Koef	SE	t	Sig.(F)
Constanta	1.633	4.040	4.033	0.27
PAD (X)	-2.569	2.110	-1.218	0.310
R	= 0.575			
R.Square	= 0.331			
Adjusted R Square	= 0.108			
SE	= 1.18776			

Sumber : data diolah, 2022

Dari model persamaan menguji Pengaruh PAD Terhadap Penerimaan Daerah di Kota Jayapura yang diperoleh dengan regresi berganda maka model persamaan tersebut yaitu:

$$Y = 1.63 - 2.57X$$

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa:

- Besarnya nilai R 0.575 yang berarti bahwa 58 persen Pengaruh variabel penerimaan daerah dapat dijelaskan oleh variabel PAD untuk sisanya 42 persen dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar penelitian ini.
- Koefisien Determinasi (R^2) adalah 0.33 yang berarti bahwa 33 persen Pengaruh variabel penerimaan daerah dapat dijelaskan oleh variabel PAD untuk sisanya 67 persen dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar penelitian ini.
- Besarnya nilai Adjusted R Square adalah 0.108 yang berarti bahwa 11 persen Pengaruh variabel penerimaan daerah dapat dijelaskan oleh variabel PAD untuk sisanya 89 persen dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar penelitian ini
- Besarnya nilai Konstanta(nilai a) sebesar 1.63 , artinya apabila variable X (PAD) tidak mengalami perubahan maka nilai Y (Pajak Daerah) adalah sebesar 1.63

Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penerimaan Daerah di Kota Jayapura sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk

Strategi besar penyebaran penduduk di masa lalu adalah mencapai pertumbuhan yang cepat dengan melakukan *trade-off* terhadap pemerataan, dalam atmosfer strategi ini, memunculkan budaya konglomerasi yang diharapkan akan menghasilkan *trickle down effect* kepada lapisan ekonomi dibawahnya. Pendekatan ini memfokuskan diri pada pembangunan industri secara besar-besaran, dimana kedudukan pemerintah memainkan peran mendorong kekuatan entrepreneur. Permasalahan yang timbul adalah kemacetan mekanisme *trickle down effect*, dimana mekanisme tersebut sebenarnya sangat diyakini akan terbentuk sejalan dengan meningkatnya akumulasi capital dan perkembangan institusi ekonomi yang mampu menyebarkan kesejahteraan yang merata. Dengan kata lain, di satu sisi penerapan pendekatan ini berhasil membangun akumulasi kapital yang cukup besar, namun di sisi lain juga telah menciptakan proses kesenjangan secara simultan, baik kesenjangan desa oleh kota, maupun kesenjangan antar kelompok dimasyarakat. Proses perkembangan ekonomi perdesaan di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh pendekatan tersebut, meskipun demikian terdapat elemen-elemen dasar yang menjadi penentu ekonomi perdesaan dan sumber daya alam sebagai primer-movernya dan menjadi pola dasar kehidupan masyarakat perdesaan.

2. Pengeluaran Pemerintah

Aspek pengeluaran pemerintah dalam kajian tentang keuangan Negara maupun daerah merupakan aspek dari penggunaan sumber daya ekonomi secara langsung yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah dan secara tidak langsung yang dimiliki oleh masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan yang ditempuh oleh suatu pemerintahan. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut terdapat berbagai teori yang menjelaskan tentang pengeluaran pemerintah, teori-teori tersebut dapat di bagi menjadi dua bagian, yaitu teori makro dan teori mikro, secara mikro tujuan dari teori perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik.

Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Lebih lanjut, perkembangan pengeluaran pemerintah secara mikro dapat dijelaskan dengan beberapa faktor yakni perubahan permintaan akan barang publik, perubahan dari aktivitas pemerintah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi, perubahan kualitas barang publik, perubahan harga faktor-faktor produksi. Barang dan jasa publik yang disediakan oleh pemerintah memilih jumlah barang/jasa yang dihasilkan. Selain itu,

pemerintah juga menentukan jumlah pajak yang akan dikenakan kepada masyarakat untuk membiayai barang/jasa publik tersebut dalam menentukan jumlah barang dan jasa publik yang disediakan.

Pengeluaran Pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut

3. Tingkat Inflasi

Inflasi tinggi (*hyper inflation*) Merupakan inflasi yang paling parah akibatnya. Harga-harga naik sampai lima atau enam kali. Masyarakat tidak lagi berkeinginan untuk menyimpan uang. Nilai uang merosot dengan tajam, sehingga ingin ditukarkan dengan barang. Perputaran uang makin cepat, harga naik secara akselerasi. Biasanya keadaan ini timbul apabila pemerintah mengalami defisit anggaran belanja (misalnya ditimbulkan oleh adanya perang) yang dibelanjai/ ditutup dengan mencetak uang. Ada cukup banyak definisi mengenai inflasi. Sejak awal 1970-an para ahli ekonomi mengartikannya sebagai naiknya tingkat harga umum secara terus menerus. Venieris dan Sebold dalam Anton Hermanto Gunawan (1991), mendefinisikan inflasi sebagai kecenderungan yang terus menerus dari tingkat harga umum untuk meningkat setiap waktu. Kenaikan harga umum yang terjadi sekali waktu saja, menurut definisi ini, tidak dapat dikatakan sebagai inflasi. Sedangkan menurut Ackley dalam Iswardono (1993), inflasi adalah suatu kenaikan harga yang terus menerus dari barang-barang dan jasa secara umum (bukan satu macam barang saja dan sesaat). Menurut definisi ini kenaikan harga yang sporadis bukan dikatakan sebagai inflasi

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, Skripsi yang berjudul. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Penerimaan Daerah di Kota Jayapura.”. Dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Besarnya nilai R 0.575 yang berarti bahwa 58 persen Pengaruh variabel penerimaan daerah dapat dijelaskan oleh variabel PAD untuk sisanya 42 persen dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar penelitian ini.
2. Koefisien Determinasi (R^2) adalah 0.33 yang berarti bahwa 33 persen Pengaruh variabel penerimaan daerah dapat dijelaskan oleh variabel PAD untuk sisanya 67 persen dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar penelitian ini.
3. Besarnya nilai Adjusted R Square adalah 0.108 yang berarti bahwa 11 persen Pengaruh variabel penerimaan daerah dapat dijelaskan oleh variabel PAD untuk sisanya 89 persen dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar penelitian ini.
4. Besarnya nilai Konstanta(nilai a) sebesar 1.63 , artinya apabila variable X (PAD) tidak mengalami perubahan maka nilai Y (Pajak Daerah) adalah sebesar 1.63

Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan terkait penelitian ini antara lain :

1. Bagi Masyarakat yang taat pajak, harus lebih teliti dalam pengambilan keputusan untuk mengikuti peranan sistem dan mekanisme bagi peningkatan PAD dan Penerimaan Daerah di Kota Jayapura.
2. Bagi pemerintah Kota Jayapura perlu juga memperhatikan analisis kebijakan yang ada supaya peranan dan fungsi pemerintah dalam menunjang peningkatan penerimaan daerah semakin baik dan semakin besar jumlah penerimaan daerah.
3. Pengaruh PAD terhadap Penerimaan Pajak Daerah , sangat di tentukan oleh kebijakan pemerintah di Kota Jayapura dalam hal ini Bappenda Kota Jayapura, sebagai badan pengelola daerah.

Daftar Pustaka

- Adit Pratyo, 2010. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat kemiskinan* (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2003-2007)
- Agustina, Ovi. 2009, *Ekonometrika Terapan*, Jogjakarta
- Ahmad Riyanton, 2014, *Analisis Pengaruh PAD terhadap penerimaan Daerah Kota Semarang*” Badan Pusat Statistik. Laporan Data di Kota Jayapura 2021
- Criswardani Suryawati. 2005. *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*. http://www.jmpkonline.net/Volume_8/Vol/08_No_03_2005
- Gustiranda Jhon, 2017, *Analisis Pengaruh PAD terhadap APBD di Kalimantan U*
- Halim, 2001, *Penerimaan Daerah, UGM* , Jogjakarta
- Ina susanti, 2015, “Pengaruh PAD terhadap penerimaan Daerah di Proponsi Jambi”
- Mardiasmo 2002, Peranan PAD bagi pembangunan ekonomi, LP3S, Bandung**
- M. Muh. Nasir, Saichudin dan Maulizar . 2008. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Kabupaten Purworejo. Jurnal Eksekutif*. Vol. 5 No.4, Agustus 2008. Lipi. Jakarta.
- Muhammad Fauzan 2006, Analisis Kontribusi PAD, UGM Jogjakarta**

- Nina Sabrina, 2019, Analisis Potensi PAD Terhadap Penerimaan D di Kota Tangerang Selatan”
- Nurcholis 2007, Potensi Penerimaan Daerah, UI Jakarta**
- Pantjar Simatupang dan Satyanu K. Dermoredjo, 2003, *Produksi Demestik Bruto*, Harga, Media Ekonomi dan Keuangan Indonesia.
- Rusmin Godu, 2020, Analisis Rasio: Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Bantul”
- Verdi Wijanarko, 2013. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Inflasi Di Kecamatan Jerbuk Kabupaten Jember*.
- Sulekale, DD., (2003). Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Ekonomi Rakyat*, Artikel Th. II No. 2, April 2003.
- Solihin, Datang. 2005. *Ketimpangan Pendapatan i Absolut*. Jakarta.
- Simon Kuznets (dalam jhingan, 2000: 57), *Economic of Financial*
- Suryawati (2005:5) Menyoroti beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya surplus penerimaan daerah.
- Teresa Ter-Minassian 1997, *Perimbangan Keuangan pusat dan daerah < andung*
- W.W. Rostow (1816-1979) mengungkapkan teori pertumbuhan ekonomi dalam bukunya yang berjudul *The Sfages Of Economic Growth*.
- Werner Sombart (1863-1947) pertumbuhan penerimaan suatu bangsa dapat di bagi menjadi tiga tingkatan.
- Kumala, Amelia Zukma. 2010. *Dinamika Kemiskinan dan Pengukuran Kerentanan Kinerja keuangan daerah*. Badan Pusat Statistik. Laporan Data di Kota Jayapura 2021
- Undang-Undang No 9 Tahun 2009 Tentang Pengawasan
- Undang-Undang No.32 Tahun 2003 tentang APBD
- Undang-Undang No.22 Tahun 2003 tentang suber-sumber penerimaan daerah
- Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan